

Overcoming Patriarchal Cultural Behaviors That Have the Potential to Increase Stunting Through Child Protection Law

Mengatasi Perilaku Budaya Patriarki Yang Perpotensi Meningkatkan Stunting Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak

Ellon Belwan Cornelius Mau^{1*} , Yanto Melkianus Paulus Ekon¹ , Adriani Rafael¹, Ewinda Isensi Feni²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Kupang, Indonesia.

² Universitas San Pedro Kupang, Kupang, Indonesia.

 : elonmau58@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The high rate of stunting in East Nusa Tenggara Province is related to patriarchal cultural practices that affect decision-making patterns in households. The dominance of fathers in determining aspects of child nutrition and health has an impact on the fulfillment of children's rights, especially in North Central Timor Regency.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the relationship between patriarchal culture and stunting and assess the role of the Child Protection Law in efforts to overcome it.

Methods of the Research: This study uses a descriptive normative-empirical legal research method with a qualitative approach through non-participatory observations, direct interviews, and normative studies of the Child Protection Law.

Results Main Findings of the Research: The results of the study showed a significant relationship between patriarchal culture and the increase in stunting rates in Noemuti District, North Central Timor Regency. The main findings included maternal dependence on husbands' decisions, low discipline in children's feeding time since pregnancy and breastfeeding, and the phenomenon of double burdens experienced by mothers. These conditions have an impact on the non-optimal fulfillment of child nutrition and health. The Child Protection Law has the potential to be used as a normative, imperative, and repressive instrument through socialization and enforcement of the obligations of parents, especially fathers (in patriarchal culture), in ensuring the fulfillment of children's rights.

Keywords: Patriarchal Culture; Stunting; Children's Rights; Parental Responsibility.

Abstrak

Latar Belakang: Tingginya angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan praktik budaya patriarki yang memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dominasi ayah dalam menentukan aspek gizi dan kesehatan anak berdampak pada pemenuhan hak anak, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara budaya patriarki dan stunting serta menilai peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya penanggulangannya.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan nonpartisipatif, wawancara langsung, serta kajian normatif terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara budaya patriarki dan meningkatnya angka stunting di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Temuan utama meliputi ketergantungan ibu pada keputusan suami, rendahnya kedisiplinan waktu makan anak sejak masa kehamilan dan menyusui, serta fenomena beban ganda yang dialami oleh ibu. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan gizi dan kesehatan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen normatif, imperatif, dan represif melalui sosialisasi serta

penegakan kewajiban orang tua, khususnya ayah (dalam budaya patriarki), dalam menjamin pemenuhan hak anak.

Kata Kunci: Budaya Patriarki; Stunting; Hak Anak; Tanggung Jawab Orang Tua.

<i>Submitted: 2026-02-01</i>	<i>Revised: 2026-08-14</i>	<i>Accepted: 2026-08-23</i>	<i>Published: 2026-10-04</i>
How To Cite: Ellon Belwan Cornelius Mau, Yanto Melkianus Paulus Ekon, Adriani Rafael, and Ewinda Isensi Feni. "Overcoming Patriarchal Cultural Behaviors That Have the Potential to Increase Stunting Through Child Protection Law." <i>PAMALI: Pattimura Magister Law Review</i> 6 no. 2 (2026): 338-350. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3765			
Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License			

PENDAHULUAN

Hak Anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak anak tidak hanya mencakup aspek perlindungan hukum, tetapi juga hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya dalam aspek kesehatan dan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia lima tahun. Pemenuhan hak atas kesehatan dan gizi anak memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ibu hamil dan ibu menyusui, karena kualitas tumbuh kembang anak sangat ditentukan sejak masa dalam kandungan, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan¹

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab pengasuhan anak sebagai kewajiban utama orang tua. Namun, dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patriarki, tanggung jawab tersebut kerap dipersepsikan sebagai dominasi peran ayah atau suami, karena anak dianggap membawa garis keturunan (marga) ayah. Struktur sosial patriarki ini tidak jarang memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak.

Gizi yang baik merupakan faktor fundamental dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan standar usianya akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang. Stunting berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia karena berhubungan dengan gangguan perkembangan kognitif, penurunan daya tahan tubuh, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa². Meskipun WHO sebelumnya menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 40% hingga tahun 2025, berbagai laporan menunjukkan bahwa target tersebut belum sepenuhnya tercapai di banyak negara, sehingga upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi agenda prioritas kesehatan global hingga saat ini.

Di Indonesia, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius karena prevalensinya melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni 20%. Data

¹ Yunani, Yunani, and Yuniastini Yuniastini. "Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan." *Holistik Jurnal Kesehatan* 15, no. 2 (2021): 256-266. <https://doi.org/10.33024/hjk.v15i2.4546>.

² Mulyani, Aisyah Tri, Miski Aghnia Khairinisa, Alf Khatib, and Anis Yohana Chaerunisaa. "Understanding Stunting: Impact, Causes, and Strategy to Accelerate Stunting Reduction—A Narrative Review." *Nutrients* 17, no.9 (2025): 1493. <https://doi.org/10.3390/nu17091493>.

menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2020 mencapai 26,92%³ Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bahkan tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 37,8%⁴ Berdasarkan pemberitaan Kompas.com tanggal 3 Maret 2022 yang dikutip dalam penelitian⁵ tentang governance networking dalam implementasi kebijakan penanganan stunting, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) disebutkan sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Informasi tersebut merujuk pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang menempatkan TTU dalam kategori wilayah dengan prevalensi stunting di atas 30 persen dan diklasifikasikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius. Tingginya angka ini menunjukkan adanya faktor-faktor kompleks yang memengaruhi terjadinya stunting, tidak hanya faktor biologis dan ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan budaya⁶

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan faktor gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi sebagai penyebab utama stunting. Bahkan, beberapa kajian menyatakan bahwa masih terbatas bukti empiris yang secara eksplisit menunjukkan kontribusi faktor sosial budaya terhadap terhambatnya pertumbuhan anak⁷, inilah yang bagi penulis melihatnya sebagai kondisi paradoksal, khususnya pada daerah-daerah dengan sistem kekrabatan patriarki. Kondisi ini menunjukkan adanya gap analysis dalam penelitian stunting, khususnya terkait peran budaya patriarki dalam pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan. Padahal, sebagian besar masyarakat di NTT menganut sistem kekerabatan patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Budaya patriarki sering kali melahirkan ketimpangan gender yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. Dalam sistem sosial yang patriarkis, laki-laki umumnya ditempatkan pada posisi dominan, sementara perempuan berada dalam kondisi subordinasi, termasuk dalam keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya keluarga. Ketimpangan ini tercermin dalam praktik budaya yang masih dijumpai di sejumlah masyarakat, seperti kebiasaan perempuan dan anak menunggu suami atau ayah untuk makan terlebih dahulu. Praktik tersebut menunjukkan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga dan berpotensi menimbulkan distribusi makanan yang tidak adil. Kondisi ini sejalan dengan temuan⁸ yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki masih menjadi penentu utama akses dan kontrol terhadap sumber makanan bergizi dalam keluarga. Akibatnya, pemenuhan gizi perempuan dan anak sering kali terabaikan, terutama pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sehingga meningkatkan risiko gangguan tumbuh kembang anak, termasuk stunting.

³ UNICEF Indonesia. *Update Indonesia Nutrition Bulletin: April–Juni 2025*.

⁴ Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). 2024. *Portrait of Stunting in Indonesia*. Jakarta. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/potret-stunting-di-indonesia/>.

⁵ Rembu, Yoakim, Pionisius Minggu, Yohanes Fritantus, Hendrikus Hironimus Botha, and Marthen Patiung. "Analisis Governance Networking Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 2 (2025): 15-30. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.13391>

⁶ Arsyia Fajarrini, and Aji Nasrul Umam. "Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam". *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2023): 20-28. <https://doi.org/10.32665/abata.v3i1.1425>.

⁷ Diana, Rian, Riris Diana Rachmayanti, Ali Khomsan, and Hadi Riyadi. "Influence of Eating Concept on Eating Behavior and Stunting in Indonesian Madurese Ethnic Group." *Journal of Ethnic Foods* 9, no. 48 (2022): 1-11. <https://doi.org/10.1186/s42779-022-00162-3>

⁸ Palan Peten, Yasinta Y, Yosef Dionisius Lamawuran, Paulus Adrianus, and K L Ratumakin. 2023. "Penanganan Stunting Dalam Budaya Patriarki: Analisis Gender Program Gerobak Cinta di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Trias Politika* 7, no. 2 (2023): 262-281. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5618>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memosisikan budaya patriarki sebagai variabel sosial budaya yang diduga berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, khususnya di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun dengan tidak bermaksud mengabaikan hasil penelitian terdahulu, tapi menempati hasil penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan faktor gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi sebagai penyebab utama stunting tersebut sebagai indikator non-perlakuan yang dikontrol. Penelitian ini mengintegrasikan tiga konsep utama, yaitu budaya patriarki, stunting, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berakar pada teori perlindungan anak dan pendekatan hak asasi manusia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner yang mengaitkan fenomena stunting dengan konstruksi budaya patriarki serta menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen normatif untuk mengatasi praktik budaya yang berpotensi melanggar hak anak. Maka dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan kajian terkait peran budaya patriarki dalam masalah stunting, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak dan upaya penurunan stunting berbasis hak anak. Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat tingginya prevalensi stunting di wilayah penelitian serta perlunya pendekatan sosial-hukum yang komprehensif dalam mendukung pencapaian target nasional dan global penurunan stunting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara budaya patriarki dengan peningkatan angka stunting, serta menganalisis bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak mampu mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh perilaku budaya tersebut guna menurunkan angka stunting. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (sosiologis) atau yang disebut dengan pendekatan gabungan normatif-empiris. Model penelitian dengan pendekatan ini mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Widyani, Retno, Li Wei, dan Wang Jun⁹, serta Lamada dan Gumilang¹⁰. Jika dijelaskan secara terpisah, pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur dan telaah terhadap referensi hukum, termasuk analisis data sekunder mengenai angka stunting dan regulasi terkait perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak dari perspektif formal. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial, khususnya bagaimana norma hukum diterapkan dalam perilaku konkret di masyarakat. Pendekatan empiris ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan responden yang relevan, guna menggali informasi mengenai: a) Praktik budaya patriarki, seperti kebiasaan menunggu keputusan suami; b) Ketidaksiplinan dalam pola waktu makan pada ibu hamil dan ibu menyusui; serta c) Beban ganda (*double burden*) yang dialami perempuan, dan bagaimana ketiga aspek ini berkaitan dengan peningkatan angka stunting. Peneliti dalam mendukung pengumpulan data lainnya, menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner/angket (daftar pertanyaan) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden kategori orang tua dari anak stunting untuk diisi jawabannya

⁹ Widyani, Retno, Li Wei, and Wang Jun. "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia." *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 4 (2025): 189-199. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i4.2095>

¹⁰ Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (2020): 61-65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.2020.61-65>

(dengan tetap dipandu oleh peneliti). Angket ini dirancang untuk mengumpulkan informasi berikut: a) Frekuensi keterlambatan makan yang dialami dalam satu hari; b) Durasi rata-rata keterlambatan makan; c) Dampak yang dirasakan terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk pengukuran parameter fisik seperti tinggi badan, berat badan, serta usia anak pada saat pengukuran untuk mengidentifikasi status stunting; d) Alasan utama di balik munculnya perilaku double burden di kalangan perempuan; serta e) Peran dan strategi yang dijalankan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani dampak budaya patriarki, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai interaksi antara faktor budaya, perilaku individu, dan efektivitas regulasi hukum dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting pada anak di Wilayah Noemuti. Variabel atau peubah adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Variabel yang umumnya dikenal dalam penelitian adalah independent variable (variabel bebas) dan dependent variable (variabel terikat). Pada penelitian ini, variabel independen adalah pengaruh budaya patriarki dengan beberapa indikator, yaitu: a) Kebiasaan menunggu suami dalam pengambilan Keputusan; b) Disiplin waktu makan pada ibu hamil dan ibu menyusui, serta; c) Beban ganda (double burden) yang dihadapi perempuan. Ketiga indikator ini diasumsikan memberi pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu peningkatan angka stunting. Untuk permasalahan kedua, variabel independen adalah cara Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengatasi meningkatnya angka stunting, sedangkan variabel dependen adalah penurunan angka stunting. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara faktor budaya patriarki dan peran regulasi hukum dalam memengaruhi angka stunting, khususnya di kalangan anak-anak pada wilayah Noemuti. Jenis dan Sumber Data: a) Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh saat peneliti melakukan pengamatan/observasi non partisipasi di lapangan. Datanya bersumber dari hasil wawancara dengan para responden; b) Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh saat peneliti dengan cara menelusuri dokumen berupa; dokumen yang memuat angka stunting di kecamatan, maupun dokumen peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Bahan Penelitian: a) Lokasi Penelitian: Penelitian ini mengambil lokasi pada kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); b) Populasi Penelitian: Menjadi satuan analisis dalam penelitian ini adalah jumlah anak stunting di kecamatan Noemuti, yang tersebar di 8 (delapan) desa, yang total berjumlah 168 anak; c) Sampel dan Teknik Sampling: Satuan pengamatan (sampel) dalam penelitian ini adalah sebesar 20% dari total populasi, yaitu berjumlah 34 anak stunting yang tersebar di delapan (8) desa di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penentuan jumlah sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik proporsional random sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang mempertimbangkan proporsi populasi pada setiap subkelompok agar representasi tiap kelompok dalam sampel tetap sebanding dengan besarnya populasi.¹¹ Maka dengan teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, tetapi proporsi pemilihannya disesuaikan dengan besarnya subpopulasi pada masing-masing desa; d) Responden Penelitian: Responden dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 45 responden, yang diambil dari beberapa kategori, yakni: 1) Orang tua dari anak stunting: 34 orang; 2) Camat Noemuti: 1 orang; 3) Kepala Puskesmas dan petugas penanganan stunting: 2 orang; 4) Petugas PUSTU: 8 orang. Jumlah: 45 orang. Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data yang digunakan

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen¹² Teknik Analisis Data: Setelah data-data (primer dan sekunder) yang diperlukan peneliti terkumpul semuanya, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif¹³. Maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak budaya patriarki terhadap peningkatan stunting, serta menawarkan solusi berbasis hukum yang relevan, yakni penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menurunkan angka stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan temuan empiris penelitian yang diperoleh dari data antropometri dan hasil wawancara lapangan dengan menggunakan kerangka teoritik sosial-budaya serta kerangka normatif hukum perlindungan anak. Data empiris menunjukkan bahwa stunting yang terjadi di Kecamatan Noemuti tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan kuantitas asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan, relasi kuasa dalam keluarga, serta praktik budaya patriarki yang membentuk pengambilan keputusan terkait pemenuhan gizi dan kesehatan anak, hal ini juga didukung oleh kajian.¹⁴ Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana praktik budaya patriarki berkontribusi terhadap terjadinya hambatan pertumbuhan linier pada anak, serta menganalisis peran Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen normatif yang berpotensi mengoreksi dan mentransformasi praktik budaya yang berdampak pada peningkatan angka stunting. Secara sistematis, pembahasan disusun berdasarkan dua fokus utama, yaitu hubungan antara budaya patriarki dengan peningkatan angka stunting dan peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengatasi praktik budaya tersebut.

A. Prevalensi Stunting di Kecamatan Noemuti

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei untuk mengumpulkan data prevalensi stunting di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selama periode 2019-2023 yang mencakup delapan desa. Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Noelmina (2025), tercatat sebanyak 168 anak mengalami stunting, yang terdiri dari 117 balita pendek dan 51 balita sangat pendek. Distribusi kasus stunting tidak merata antar desa, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Anak Stunting yang Lahir Tahun 2019-2023 di Kecamatan Noemuti Berdasarkan Desa dan Kategori Stunting

No	Desa	Balita Pendek	Balita Sangat Pendek	Jumlah
1	Nibaaf	16	4	20
2	Oenak	13	4	17
3	Nifobo	24	6	30
4	Kiuola	19	11	30
5	Fatumuti	13	7	20

¹² Chand, Satish Prakash. "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis." *Advances in Educational Research and Evaluation* 6, no. 1 (2025): 303-317. <https://doi.org/10.25082/aere.2025.01.001>.

¹³ Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁴ Sarilisnawati, Pengetahuan, Hamzah Hasyim, and Nur Alam Fajar. "Analisis Hubungan Karakteristik Ibu, Pengetahuan Sosial Budaya Dengan Kejadian Stunting", *Jurnal Kesehatan* 13, no. 1 (2022): 151-60. <https://doi.org/10.35730/jk.v13i0.741>.

6	Banfanu	16	12	28
7	Noemuti	6	1	7
8	Bijeli	10	6	16
Jumlah		117	51	168

Sumber: Puskesmas Kecamatan Noelmina, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Nifoboke dan Kiuola memiliki jumlah stunting tertinggi (masing-masing 30 anak), sedangkan Desa Noemuti memiliki jumlah terendah (7 anak). Data ini mengindikasikan adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, dan pola pengasuhan antar desa yang berpotensi memengaruhi terjadinya stunting.

B. Kondisi Anak Stunting Berdasarkan Pengukuran Antropometri

Dari total populasi 168 anak stunting, peneliti mengambil sampel 34 kepala keluarga untuk dilakukan kunjungan rumah dan verifikasi data antropometri. Pengukuran meliputi jenis kelamin, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB) anak, serta wawancara mendalam terkait praktik pengasuhan dan budaya patriarki.

Tabel 2. Distribusi tinggi badan anak stunting di Kecamatan Noemuti menunjukkan bahwa

Interval Tinggi Badan (cm)		Jumlah Anak	Persentase (%)
59 – 64		1	2,9
65 – 70		3	8,8
71 – 76		7	20,6
77 – 82		6	17,6
83 -88		10	29,4
89- 96		7	20,6
Total		34	100

No	Jenis Kelamin	Jumlah Anak	Persentase (%)
1	Laki-laki (L)	24	70,6
2	Perempuan (P)	10	29,4
Jumlah		34	100,0

Berdasarkan hasil pengukuran antropometri terhadap 34 anak stunting di Kecamatan Noemuti, diperoleh gambaran kondisi pertumbuhan anak yang ditinjau dari tinggi badan, jenis kelamin, serta status gizi berdasarkan indikator antropometri. Distribusi tinggi badan anak stunting menunjukkan bahwa proporsi terbesar berada pada interval 83-88 cm, yaitu sebanyak 10 anak (29,4%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak mengalami hambatan pertumbuhan linier pada rentang tinggi badan yang relatif seragam. Selanjutnya, anak dengan tinggi badan pada interval 71-76 cm dan 89-96 cm masing-masing berjumlah 7 anak (20,6%), diikuti interval 77-82 cm sebanyak 6 anak (17,6%). Sementara itu, masih ditemukan anak dengan tinggi badan sangat rendah pada interval 59-64 cm, yaitu 1 anak (2,9%), yang mencerminkan kondisi stunting berat pada usia balita. Temuan ini menunjukkan adanya variasi tingkat keparahan stunting pada anak-anak yang menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan jenis kelamin, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak stunting berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 24 anak (70,6%), sedangkan anak perempuan berjumlah 10 anak (29,4%). Dominasi kasus stunting pada anak laki-laki ini

mengindikasikan bahwa anak laki-laki lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan linier dibandingkan anak perempuan pada lokasi penelitian.

Hasil pengukuran status gizi menunjukkan bahwa sebagian besar anak memiliki berat badan menurut umur (BB/U) dalam kategori baik, namun mengalami gangguan pertumbuhan linier yang ditunjukkan oleh tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah standar normal. Selain itu, ditemukan pula beberapa anak dengan ketidaksesuaian antara berat badan dan tinggi badan (BB/TB). Kondisi ini mengindikasikan bahwa stunting yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan asupan gizi secara kuantitatif, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain yang bersifat non-gizi. Maka dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Kecamatan Noemuti tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan asupan gizi, tetapi juga berkaitan dengan faktor struktural dan sosial, terutama praktik pengasuhan dan budaya patriarki dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut diduga berperan dalam pola pemenuhan kebutuhan anak yang berdampak pada pertumbuhan linier jangka panjang, dan akan dibahas lebih lanjut pada subpembahasan berikutnya.

C. Keterkaitan Temuan Antropometri dengan Budaya Patriarki

Hasil pengukuran antropometri terhadap 34 anak stunting di Kecamatan Noemuti menunjukkan bahwa sebagian besar anak berada pada interval tinggi badan 83-88 cm (29,4%), diikuti interval 71-76 cm dan 89-96 cm (masing-masing 20,6%). Pola ini menunjukkan bahwa mayoritas anak mengalami hambatan pertumbuhan linier yang bersifat kronis dan relatif seragam, bukan kondisi gizi akut. Temuan ini diperkuat oleh hasil pengukuran berat badan menurut umur (BB/U) yang sebagian besar berada dalam kategori baik, namun tidak diikuti dengan tinggi badan menurut umur (TB/U) yang normal.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa stunting di wilayah penelitian tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan asupan gizi secara kuantitatif, melainkan oleh faktor-faktor struktural dan sosial yang bekerja dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, budaya patriarki menjadi variabel sosial yang relevan untuk menjelaskan mengapa gangguan pertumbuhan linier tetap terjadi meskipun ketersediaan makanan relatif mencukupi.

Dominasi kasus stunting pada anak laki-laki (70,6%) juga menarik untuk dicermati. Hal ini juga berkaitan dengan kajian¹⁵ yang menunjukkan perbedaan prevalensi berdasarkan jenis kelamin, di mana temuan epidemiologis sering melaporkan perbedaan prevalensi antara anak laki-laki dan Perempuan. Secara biologis, anak laki-laki memang lebih rentan terhadap gangguan pertumbuhan pada kondisi lingkungan yang kurang optimal. Namun, dalam konteks sosial budaya patriarki, temuan ini menunjukkan ironi tersendiri, karena anak laki-laki justru berada dalam struktur budaya yang secara normatif lebih diprioritaskan. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan distribusi makanan, tetapi menyangkut pola pengasuhan, pengambilan keputusan, serta relasi kuasa dalam keluarga. Maka dengan demikian, data antropometri berfungsi sebagai bukti empiris bahwa stunting di Kecamatan Noemuti merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan penjelasan lintas disiplin, termasuk perspektif sosial budaya dan hukum.

D. Hubungan Budaya Patriarki dengan Peningkatan Angka Stunting

¹⁵ Dembele, Bernard. "Sex Differences in Child Stunting in Sub-Saharan Africa: A Meta-Analysis of Twenty Countries from 2010 to 2016." *World Nutrition* 16, no. 1 (2025): 2-10. <https://doi.org/10.26596/wn.20251612-10>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki di Kecamatan Noemuti berkontribusi terhadap peningkatan risiko stunting melalui tiga praktik utama, yaitu praktik menunggu keputusan suami, ketidakdisiplinan waktu makan ibu hamil dan menyusui, serta beban ganda (*double burden*) yang dialami perempuan. Ketiga praktik ini saling berkaitan dan membentuk pola pengasuhan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan gizi dan kesehatan anak¹⁶

1. Praktik Menunggu Keputusan Suami dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Gizi Anak

Praktik menunggu keputusan suami merupakan manifestasi nyata dari struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 79,4% responden menyatakan bahwa istri, termasuk ibu hamil dan menyusui, harus menunggu keputusan suami dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan dan akses layanan Kesehatan, dalam perspektif pemenuhan hak anak, praktik ini memiliki implikasi serius. Ketergantungan ibu terhadap keputusan suami menyebabkan keterlambatan pemenuhan kebutuhan gizi, baik bagi ibu maupun anak. Padahal, periode kehamilan dan menyusui merupakan fase krusial dalam pembentukan pertumbuhan linier anak. Keterlambatan dan ketidaktepatan pemenuhan gizi pada fase ini berkontribusi terhadap terjadinya stunting, sebagaimana tercermin dalam data antropometri yang menunjukkan TB/U berada di bawah standar normal.

Normalisasi praktik “menunggu suami” sebagai sesuatu yang wajar menunjukkan bagaimana budaya patriarki bekerja secara hegemonik, sehingga perempuan tidak memandang kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Padahal, secara struktural praktik ini membatasi otonomi ibu dalam memenuhi kebutuhan biologisnya sendiri dan anak, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan generasi berikutnya¹⁷

2. Ketidakdisiplinan Waktu Makan Ibu Hamil dan Menyusui sebagai Faktor Stunting

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan waktu makan ibu hamil dan menyusui merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting, dalam budaya patriarki, perempuan sering kali memprioritaskan pekerjaan domestik, kepentingan suami, serta kewajiban adat dan sosial dibandingkan kebutuhan biologisnya sendiri. Ketidakteraturan waktu makan ini tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan makanan, melainkan oleh pengaturan prioritas dalam rumah tangga. Ibu hamil dan menyusui sering kali makan terakhir, menunda makan, atau makan dalam kondisi terburu-buru setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Pola ini berdampak pada efektivitas metabolisme dan penyerapan zat gizi, meskipun secara kuantitas makanan relatif mencukupi¹⁸

Fenomena ini menjelaskan mengapa sebagian besar anak dalam penelitian memiliki BB/U yang baik, tetapi tetap mengalami stunting berdasarkan TB/U. Hal ini didukung

¹⁶ Prameswari, Yoga Putra. “Manifestasi Patriarki Dalam Kejadian Stunting Studi Kasus 5 (Lima) Keluarga Di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.” Yogyakarta: Magister Ilmu Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022.

¹⁷ Pienaaah, Cornelius K.A., Mildred Naamwintome Molle, and Isaac Luginaah. “The Role of Child Nutrition Counselling, Gender Dynamics, and Intra-Household Feeding Decision-Making on Child Dietary Diversity in Semi-Arid Northern Ghana.” *Appetite* 204 (2025): 107755. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2024.107755>.

¹⁸ Raghavan, Ramkripa, Carol Dreibelbis, Brittany L. Kingshipp, Yat Ping Wong, Barbara Abrams, Alison D. Gernand, Kathleen M. Rasmussen, et al. “Dietary Patterns before and during Pregnancy and Birth Outcomes: A Systematic Review.” *The American journal of clinical nutrition* 109, no. 1 (2019): 729S-756S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy353>.

oleh kajian¹⁹ yang mengemukakan bahwa pola frekuensi dan keteraturan waktu makan ibu selama kehamilan berpengaruh terhadap pertumbuhan linier anak sejak lahir. Studi observasional terhadap lebih dari 1.000 pasangan ibu-bayi menunjukkan bahwa perbedaan pola frekuensi makan ibu hamil berkaitan signifikan dengan panjang badan neonatus, dengan selisih sekitar 0,36 cm atau $\pm 0,7\%$ dari rata-rata panjang badan lahir bayi. Meskipun secara numerik tampak kecil, perbedaan ini bermakna secara biologis karena panjang badan lahir merupakan indikator awal pertumbuhan linier yang bersifat kumulatif dan prediktif terhadap risiko stunting di kemudian hari. Maka dengan demikian, stunting tidak hanya berkaitan dengan “apa yang dimakan”, tetapi juga “kapan dan bagaimana makanan dikonsumsi”. Aspek waktu makan yang diabaikan dalam praktik pengasuhan patriarkal menjadi faktor risiko yang signifikan namun sering tidak disadari.

3. Beban Ganda Perempuan dan Dampaknya terhadap Kualitas Pengasuhan

Beban ganda yang dialami perempuan, khususnya ibu hamil dan menyusui, merupakan faktor struktural lain yang berkontribusi terhadap peningkatan angka stunting. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, tetapi juga terlibat dalam aktivitas ekonomi dan kewajiban adat. Beban ini berlangsung bahkan ketika perempuan berada dalam kondisi fisik yang rentan. Dalam konteks masyarakat patriarki, perempuan tetap dibebani tanggung jawab domestik meskipun terlibat dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menciptakan beban ganda yang berdampak pada keterbatasan waktu makan, istirahat, dan perhatian terhadap pengasuhan anak, sehingga meningkatkan risiko stunting secara struktural²⁰. Berdasarkan kajian Rija Helti and Hayati (2025)²¹ menunjukkan bahwa anak yang diasuh oleh ibu dengan beban ganda memiliki risiko stunting sekitar 30–60% lebih tinggi dibandingkan anak dari ibu yang tidak mengalami beban kerja berlebih, terutama pada konteks rumah tangga dengan dukungan pengasuhan dan literasi gizi yang terbatas. Kelelahan fisik dan psikis akibat beban kerja yang berlebihan berdampak pada kualitas pengasuhan dan kesehatan ibu. Tubuh yang berada dalam kondisi stres kronis tidak mampu memanfaatkan asupan gizi secara optimal, sehingga berdampak pada pertumbuhan janin dan anak. Kondisi ini selaras dengan temuan antropometri yang menunjukkan adanya stunting kronis meskipun asupan gizi relatif tersedia. Maka dengan demikian, beban ganda perempuan harus dipahami bukan sebagai persoalan individual, melainkan sebagai produk struktur sosial patriarki yang menempatkan perempuan sebagai penyangga utama kehidupan keluarga tanpa dukungan yang memadai. Struktur ini secara tidak langsung melanggengkan risiko stunting.

E. Peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Mengatasi Budaya Patriarki

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) memiliki potensi besar untuk dijadikan instrumen normatif dalam mengoreksi praktik budaya patriarki yang berdampak pada stunting.

¹⁹ Atomei, Oana Liliana, Petronela Vicoveanu, Camelia Oana Iațcu, Florina Ioana Gliga, Calin Coriolan Craciun, and Monica Tarcea. 2025. “Associations Between Maternal Meal Frequency Patterns During Pregnancy and Neonatal Anthropometric Outcomes: A Quantitative Cross-Sectional Study.” *Nutrients* 17, no. 15 (2025): 2437. <https://doi.org/10.3390/nu17152437>.

²⁰ Ahmed, Mekiya, Kebeush Zepre, Kifle Lentero, Tigist Gebremariam, Zeyneba Jemal, Asegedech Wondimu, Jemal Bedewi, Tamirat Melis, and Alazar Gebremeskel. “The Relationship between Maternal Employment and Stunting among 6–59 Months Old Children in Gurage Zone Southern Nation Nationality People’s Region, Ethiopia: A Comparative Cross-Sectional Study.” *Frontiers in Nutrition* 9 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.964124>.

²¹ Rija Helti, Mestika, and Nila Hayati. “Maternal Work Status and Nutritional Knowledge as Predictors of Toddler Stunting: Evidence from Asahan Regency, Indonesia.” *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health* 7, no. 2 (2025): 84–94. <http://dx.doi.org/10.30829/contagion.v7i2.25432>.

1. UUPA sebagai Instrumen Sosialisasi Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua

UUPA menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks stunting, hak ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi ibu hamil dan menyusui. Oleh karena itu, sosialisasi UUPA harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan anak pascakelahiran, tetapi juga pada fase prenatal dan postnatal awal. Sosialisasi hukum yang menekankan bahwa pemenuhan gizi ibu merupakan bagian dari pemenuhan hak anak menjadi penting untuk menggeser cara pandang patriarkal yang meminggirkan kebutuhan biologis perempuan.

2. Norma Imperatif UUPA dalam Konteks Masyarakat Patriarki

Pasal-pasal dalam UUPA, khususnya Pasal 23 dan Pasal 45, mengandung norma imperatif yang meletakkan kewajiban hukum pada orang tua untuk menjamin kesejahteraan anak. Dalam masyarakat patriarki, kewajiban ini secara faktual berada pada ayah sebagai pemegang otoritas keputusan. Maka dengan demikian, kelalaian ayah dalam memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan anak, termasuk selama masa kehamilan, harus dipandang sebagai pelanggaran kewajiban hukum, bukan sekadar pelanggaran norma adat. Pendekatan imperatif ini penting agar hukum mampu mengoreksi praktik budaya yang merugikan kepentingan terbaik anak.

3. UUPA sebagai Instrumen Transformasi Sosial

Pertemuan antara budaya patriarki dan UUPA menunjukkan perlunya hukum berperan sebagai agen perubahan sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam menilai praktik budaya. Praktik yang terbukti meningkatkan risiko stunting tidak dapat dipertahankan atas nama adat. Maka dengan demikian, UUPA harus diposisikan sebagai instrumen korektif dan transformatif yang mampu menggeser relasi kuasa dalam keluarga menuju pola pengasuhan yang lebih adil, setara, dan berorientasi pada hak anak.

KESIMPULAN

Budaya patriarki memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan angka stunting di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Praktik menunggu keputusan suami, ketidakdisiplinan waktu makan ibu hamil dan menyusui, serta beban ganda yang dialami perempuan berdampak pada keterlambatan dan ketidaktepatan pemenuhan gizi dan kesehatan anak, khususnya pada periode krusial 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor gizi, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya yang bersifat struktural. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam menurunkan angka stunting melalui fungsi normatif dan imperatifnya. Norma kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya yang melekat pada peran ayah dalam masyarakat patriarki, dapat dijadikan dasar hukum untuk mengoreksi praktik budaya yang merugikan kepentingan terbaik anak. Melalui sosialisasi dan penegakan kewajiban hukum orang tua, Undang-Undang Perlindungan Anak berpotensi menjadi instrumen korektif dan transformatif dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi. Maka dengan demikian, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan hukum berbasis hak anak yang terintegrasi dengan pemahaman konteks sosial-budaya, agar upaya penurunan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

- Ahmed, Mekiya, Kebebus Zepre, Kifle Lentero, Tigist Gebremariam, Zeyneba Jemal, Asegedech Wondimu, Jemal Bedewi, Tamirat Melis, and Alazar Gebremeskel. "The Relationship between Maternal Employment and Stunting among 6–59 Months Old Children in Gurage Zone Southern Nation Nationality People's Region, Ethiopia: A Comparative Cross-Sectional Study." *Frontiers in Nutrition* 9 (2022): 1-11. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.964124>.
- Arsyia Fajarrini, and Aji Nasrul Umam. "Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam". *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2023): 20-28. <https://doi.org/10.32665/abata.v3i1.1425>.
- Atomei, Oana Liliana, Petronela Vicoveanu, Camelia Oana Iațcu, Florina Ioana Gliga, Calin Coriolan Craciun, and Monica Tarcea. 2025. "Associations Between Maternal Meal Frequency Patterns During Pregnancy and Neonatal Anthropometric Outcomes: A Quantitative Cross-Sectional Study." *Nutrients* 17, no. 15 (2025): 2437. <https://doi.org/10.3390/nu17152437>.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). 2024. *Portrait of Stunting in Indonesia*. Jakarta. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/potret-stunting-di-indonesia/>.
- Chand, Satish Prakash. "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis." *Advances in Educational Research and Evaluation* 6, no. 1 (2025): 303–317. <https://doi.org/10.25082/aere.2025.01.001>.
- Dembele, Bernard. "Sex Differences in Child Stunting in Sub-Saharan Africa: A Meta-Analysis of Twenty Countries from 2010 to 2016." *World Nutrition* 16, no. 1 (2025): 2-10. <https://doi.org/10.26596/wn.20251612-10>.
- Diana, Rian, Riris Diana Rachmayanti, Ali Khomsan, and Hadi Riyadi. "Influence of Eating Concept on Eating Behavior and Stunting in Indonesian Madurese Ethnic Group." *Journal of Ethnic Foods* 9, no. 48 (2022): 1-11. <https://doi.org/10.1186/s42779-022-00162-3>.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (2020): 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.2020.61-65>.
- Mulyani, Aisyah Tri, Miski Aghnia Khairinisa, Alfi Khatib, and Anis Yohana Chaerunisaa. "Understanding Stunting: Impact, Causes, and Strategy to Accelerate Stunting Reduction—A Narrative Review." *Nutrients* 17, no.9 (2025): 1493, <https://doi.org/10.3390/nu17091493>.
- Palan Peten, Yasinta Y, Yosef Dionisius Lamawuran, Paulus Adrianus, and K L Ratumakin. 2023. "Penanganan Stunting Dalam Budaya Patriarki: Analisis Gender Program Gerobak Cinta di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Trias Politika* 7, no. 2 (2023): 262-281. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5618>.

- Pienaaah, Cornelius K.A., Mildred Naamwintome Molle, and Isaac Luginaah. "The Role of Child Nutrition Counselling, Gender Dynamics, and Intra-Household Feeding Decision-Making on Child Dietary Diversity in Semi-Arid Northern Ghana." *Appetite* 204 (2025): 107755. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2024.107755>.
- Prameswari, Yoga Putra. "Manifestasi Patriarki Dalam Kejadian Stunting Studi Kasus 5 (Lima) Keluarga Di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo." Yogyakarta: Magister Ilmu Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Raghavan, Ramkripa, Carol Dreibelbis, Brittany L. Kingshipp, Yat Ping Wong, Barbara Abrams, Alison D. Gernand, Kathleen M. Rasmussen, et al. "Dietary Patterns before and during Pregnancy and Birth Outcomes: A Systematic Review." *The American journal of clinical nutrition* 109, no. 1 (2019): 729S-756S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy353>.
- Rembu, Yoakim, Pionisius Minggu, Yohanes Fritantus, Hendrikus Hironimus Botha, and Marthen Patiung. "Analisis Governance Networking Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 2 (2025): 15-30. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.13391>.
- Rija Helti, Mestika, and Nila Hayati. "Maternal Work Status and Nutritional Knowledge as Predictors of Toddler Stunting: Evidence from Asahan Regency, Indonesia." *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health* 7, no. 2 (2025): 84-94. <http://dx.doi.org/10.30829/contagion.v7i2.25432>.
- Sarilisnawati, Pengetahuan, Hamzah Hasyim, and Nur Alam Fajar. "Analisis Hubungan Karakteristik Ibu, Pengetahuan Sosial Budaya Dengan Kejadian Stunting", *Jurnal Kesehatan* 13, no. 1 (2022): 151-60. <https://doi.org/10.35730/jk.v13i0.741>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- UNICEF Indonesia. *Update Indonesia Nutrition Bulletin: April-Juni 2025*.
- Widayani, Retno, Li Wei, and Wang Jun. "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia." *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 4 (2025): 189-199. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i4.2095>.
- Yunani, Yunani, and Yuniastini Yuniastini. "Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan." *Holistik Jurnal Kesehatan* 15, no. 2 (2021): 256-266, <https://doi.org/10.33024/hjk.v15i2.4546>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

